

Evaluasi Program Pemberian Beasiswa Kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Dampaknya terhadap Mahasiswa Penerima Beasiswa

Burhanuddin Sagala^{1*}, Dara Aisyah²

¹⁻²Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: burhansagala22@gmail.com

Abstract. *This study aims to evaluate the implementation of a scholarship program established through a Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Labuhanbatu Utara Regency and partner universities, and to analyze its impact on the educational quality of scholarship recipients. The study is motivated by the low participation rate in higher education in the region, despite the government's efforts to improve human resource quality through scholarship initiatives. Fluctuations in the number of recipients and implementation challenges highlight the need for a comprehensive evaluation. This research employs a mixed-methods approach combining qualitative and quantitative data. Qualitative data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving key informants such as program administrators and scholarship recipients. Quantitative data were obtained through surveys using questionnaires. The evaluation uses the CIPP model (Context, Input, Process, Product) to assess policy context, resources, implementation processes, and program outcomes. The findings indicate that the MoU-based scholarship program positively contributes to improving access and quality of education, although some limitations remain. Overall, the program represents a strategic effort to enhance human resources, reduce educational disparities, and strengthen the competitiveness of the younger generation.*

Keywords: CIPP; Higher Education; MoU; Program Evaluation; Scholarship.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program pemberian beasiswa hasil kerja sama (*Memorandum of Understanding*/MoU) antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan perguruan tinggi mitra serta menganalisis dampaknya terhadap kualitas pendidikan mahasiswa penerima. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, meskipun pemerintah daerah telah menginisiasi program beasiswa sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Fluktuasi jumlah penerima beasiswa dan dinamika pelaksanaan program menunjukkan perlunya evaluasi yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mix method*) dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen dengan informan kunci, seperti pengelola program dan mahasiswa penerima beasiswa. Sementara itu, data kuantitatif diperoleh melalui survei menggunakan kuesioner. Model evaluasi yang digunakan adalah CIPP (*Context, Input, Process, Product*) untuk menilai konteks kebijakan, sumber daya, proses pelaksanaan, serta hasil dan dampak program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program beasiswa MoU memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan mahasiswa, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Pendekatan metode campuran memungkinkan penelitian ini tidak hanya menyajikan data statistik, tetapi juga pengalaman subjektif penerima beasiswa. Secara keseluruhan, program ini merupakan langkah strategis dalam pengembangan sumber daya manusia, serta berpotensi mengurangi kesenjangan akses pendidikan dan meningkatkan daya saing generasi muda secara berkelanjutan.

Kata kunci: Beasiswa; CIPP; Evaluasi Program; MoU; Pendidikan Tinggi.

1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan bertambahnya penduduk yang tidak terkontrol mengakibatkan adanya masalah-masalah sosial, salah satunya di sektor pendidikan. Terutama dikalangan masyarakat kurang mampu. Dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, dimana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memungkinkan untuk melakukan kreasi, inovasi dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan sumber daya manusia. Karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia untuk menciptakan manusia produktif yang mampu memajukan bangsanya (Kunaryo, 2009). Pendidikan dalam arti luas terkandung pengertian mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. hal ini dikarenakan pendidikan merupakan jalan bagi masyarakat untuk dapat mengakses lebih jauh sektor kesehatan untuk mendapatkan hidup yang layak. Pemerintah sebagai penanggung jawab tertinggi dalam suatu negara tentunya harus memberikan akses yang dapat dijangkau dengan mudah bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan (Neely et al., 2002).

Berdasarkan laporan kementerian pendidikan Republik Indonesia yang telah melakukan survey terhadap anak yang putus sekolah pada tahun 2019 terdapat 2,5 jutaan anak untuk usia 7-15 tahun di Indonesia yang tidak dapat melanjutkan pendidikan, disebabkan anggaran biaya pendidikan yang tinggi maka putus sekolah menjadi sasaran terbaik bagi masyarakat ekonomi ke bawah (Sari, 2023). Pendidikan merupakan sebuah proses pembentukan pribadi dimana dari pendidikan yang sistematis maka akan terbentuk kepribadian seorang manusia. Pendidikan merupakan posisi sentral dalam sebuah pembangunan sebab sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Oleh sebab itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan (Franzen, 2020).

Berdasarkan data terbaru dari Sindonews, sekitar 68,55% lulusan SMA di Indonesia tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi pada tahun 2023. Dengan demikian, angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan tinggi hanya mencapai 31,45%. Faktor-faktor seperti keterbatasan finansial, akses pendidikan, dan kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pendidikan tinggi memengaruhi rendahnya angka tersebut. Sebagai tambahan, data menunjukkan bahwa hanya sekitar 10,15% penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi, menempatkan Indonesia pada posisi menengah ke bawah dibandingkan dengan negara-negara lain.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mencatat, dari jumlah siswa SMA yang tamat pada tahun 2022 di Sumut hanya 36,7% yang kuliah melanjutkan studi di perguruan tinggi. Data itu memperlihatkan masih rendahnya jumlah siswa kuliah di perguruan tinggi di beberapa wilayah. Salah satu daerah yang memiliki angka tertinggi siswa SMA tidak melanjutkan ke

perguruan tinggi adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan 84,8% yang artinya Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA sederajat hanya 15,2% yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Labuhanbatu Utara masuk ke dalam daftar daerah dengan siswa yang sangat sedikit melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi bersama daerah lainnya seperti, Batu Bara sebesar 94,9% dan Serdang Bedagai angka siswa SMA yang tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi sebesar 82,6%.

Kebijakan beasiswa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan suatu bangsa, terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akses pendidikan yang bermutu (Ilechukwu, 2014; Sari, 2023). Berbagai penelitian telah menunjukkan bagaimana program beasiswa memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi atau bahkan dapat menjadi model potensial untuk membangun kapasitas kepemimpinan generasi muda bangsa (Franzen, 2020; Gufron et al., 2022). Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang dalam penelitian ini ditempuh melalui kebijakan beasiswa dapat menjadi modal utama bagi pembangunan nasional.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi warganya, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara telah bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi melalui pemberian beasiswa. Salah satu universitas yang terlibat dalam program ini adalah Universitas Sumatera Utara (USU), yang telah menerima rata-rata 15 hingga 17 mahasiswa setiap tahun dalam periode 2020 hingga 2023. Selain USU, universitas-universitas lain seperti Universitas Negeri Medan (UNIMED), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), dan Institut Pertanian Bogor (IPB) juga menjadi mitra strategis. Data menunjukkan bahwa program ini telah melibatkan ratusan mahasiswa setiap tahunnya, yang tersebar di berbagai program studi dan jenjang pendidikan.

Namun, terdapat penurunan jumlah penerima beasiswa dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, di UNIMED dan UINSU terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022 dan 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa di UNIMED turun dari 62 orang pada tahun 2021 menjadi 33 orang pada tahun 2023, sementara di UINSU turun dari 85 orang pada tahun 2021 menjadi 63 orang pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan adanya dinamika dalam implementasi program beasiswa, yang bisa dipengaruhi oleh faktor anggaran, seleksi penerima, atau evaluasi keberlanjutan program.

Selain itu, pelibatan universitas di luar Sumatera Utara, seperti Institut Pertanian Bogor, meskipun relatif kecil, menunjukkan langkah progresif dalam mendiversifikasi pilihan

pendidikan mahasiswa penerima beasiswa. Jumlah penerima di IPB meningkat dari 1 orang pada tahun 2020 menjadi 5 orang pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan potensi kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi ternama di luar wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak program ini terhadap kualitas pendidikan mahasiswa penerima, sekaligus untuk merancang strategi keberlanjutan yang lebih efektif (Hilal et al., 2015).

Selanjutnya, menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada karya ilmiah atau penelitian yang membahas secara detail dan spesifik seperti penelitian yang penulis lakukan mengenai “Evaluasi Program Pemberian Beasiswa Kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU). Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Dampaknya Terhadap Mahasiswa Penerima Beasiswa. Sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan, peneliti menggunakan 3 (tiga) penelitian terdahulu sebagai referensi ilmiah terhadap “Evaluasi Program Pemberian Beasiswa Kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Dampaknya Terhadap Mahasiswa Penerima Beasiswa.

Penelitian Pertama, dilakukan oleh Thahirah (2021) dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Beasiswa Pemerintah Kota Dumai Kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu Asal Kota Dumai”. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa oleh Pemerintah Kota Dumai kepada mahasiswa dan mahasiswi berprestasi dari keluarga kurang mampu. Menggunakan model Van Meter dan Van Horn, penelitian ini meninjau enam variabel keberhasilan kebijakan: standar dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kendala dalam implementasi kebijakan ini, seperti tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, kurangnya informasi mengenai persyaratan Basis Data Terpadu (BDT)/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), keterbatasan sumber daya, serta kurangnya transparansi dari agen pelaksana. Hambatan lain termasuk minimnya sosialisasi mengenai DTKS, terbatasnya kuota penerima beasiswa karena anggaran yang terbatas, serta kesulitan mahasiswa dari luar Kota Dumai dalam mengurus berkas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan dalam proses implementasi kebijakan beasiswa, terutama dalam hal kejelasan prosedur, komunikasi yang lebih baik, dan peningkatan sumber daya guna mencapai efektivitas yang lebih tinggi dalam program bantuan pendidikan ini.

Penelitian kedua dilakukan oleh Defa et al. (2024) dengan judul “Implementasi Program Beasiswa Full Sarjana di Kota Cilegon”. Penelitian ini membahas tentang implementasi program Beasiswa Full Sarjana di Kota Cilegon yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi dan daya serap tenaga kerja. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada rendahnya angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Banten dan kurangnya tenaga kerja berkualifikasi tinggi di industri Kota Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon mengeluarkan kebijakan Beasiswa Full Sarjana melalui Program Kartu Cilegon Sejahtera sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara terhadap 15 informan yang terdiri dari pelaksana program, penerima beasiswa, dan masyarakat. Analisis data dilakukan berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam aspek: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala dalam komunikasi antar organisasi dan pencapaian target penerima beasiswa.

Salah satu kendala utama adalah kurangnya sosialisasi yang menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui tentang program ini. Selain itu, terdapat kesalahan komunikasi antara pihak terkait yang menyebabkan masyarakat kebingungan dalam proses pendaftaran. Meskipun begitu, aspek sumber daya manusia dan keuangan dalam pelaksanaan program ini dinilai sudah optimal. Pemerintah Kota Cilegon bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan pihak perbankan dalam pengelolaan anggaran beasiswa, sehingga distribusi dana berjalan dengan lancar.

Dalam aspek karakteristik agen pelaksana, tim pelaksana di Dinas Pendidikan Kota Cilegon dinilai sudah memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan tugasnya. Program ini juga mendapatkan dukungan positif dari masyarakat dan lingkungan politik, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan kebutuhan sosial. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa program Beasiswa Full Sarjana telah berjalan dengan baik, tetapi masih

perlu perbaikan dalam aspek sosialisasi dan komunikasi antar organisasi agar lebih banyak masyarakat dapat mengakses manfaat dari program ini.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fiani et al. (2024) dengan judul “Dampak Program Beasiswa “Bakti BCA” terhadap Mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak”. Penelitian ini membahas dampak dari program beasiswa “Bakti BCA” terhadap mahasiswa Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat yang dirasakan oleh penerima beasiswa. Selain itu, beasiswa ini berkontribusi pada peningkatan motivasi belajar dan prestasi akademik penerima, mengurangi ketidaksetaraan pendidikan, serta membuka peluang karir yang lebih baik di masa depan. Program ini juga dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank BCA yang tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar perlunya dilakukan studi evaluasi implementasi program pemberian beasiswa kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Universitas Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Thahirah (2021) menyoroti implementasi kebijakan pemberian beasiswa oleh Pemerintah Kota Dumai dengan menggunakan model Van Meter dan Van Horn, meninjau enam variabel keberhasilan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam program ini adalah ketidakjelasan Standar Operasional Prosedur (SOP), kurangnya sosialisasi terkait persyaratan penerimaan, serta keterbatasan anggaran dan transparansi dari pihak pelaksana. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Defa et al. (2024) mengkaji implementasi program Beasiswa Full Sarjana di Kota Cilegon, yang juga menggunakan pendekatan teori Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun program telah berjalan dengan baik, masih terdapat kendala dalam komunikasi antarorganisasi serta kurangnya sosialisasi, yang menyebabkan keterbatasan akses bagi masyarakat. Selanjutnya, penelitian Fiani et al. (2024) lebih berfokus pada dampak beasiswa “Bakti BCA” bagi mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan menyoroti manfaat program terhadap akses pendidikan, pemenuhan biaya, peningkatan motivasi belajar, dan peluang karir mahasiswa penerima.

Dari ketiga penelitian tersebut, terlihat bahwa belum ada kajian yang secara spesifik mengevaluasi implementasi program beasiswa yang merupakan hasil kerja sama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, seperti yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten

Labuhanbatu Utara dan Universitas Sumatera Utara. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan dan dampak program, tetapi belum secara mendalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kerja sama dalam pemberian beasiswa, terutama dalam konteks kemitraan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengevaluasi bagaimana implementasi MoU pemberian beasiswa ini dijalankan, apakah mencapai tujuan yang diharapkan, serta bagaimana dampaknya terhadap mahasiswa penerima beasiswa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki mekanisme kerja sama beasiswa antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi, serta memastikan efektivitas dan keberlanjutan program beasiswa tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Kebijakan secara umum diartikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Kemudian istilah kebijakan menurut Wahab (*dalam Sawir, 2021: 124*) diartikan seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*. Kebijakan berfungsi sebagai landasan atau pedoman untuk mengarahkan tindakan kelompok dalam mencapai tujuan tertentu (Meter & Horn, 1975). Richard Rose (1969) sebagai seorang pakar ilmu politik mengemukakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri (*dalam Suharno, 2013: 4*). Beliau menuturkan kebijakan tidak boleh dipahami sebagai suatu keputusan terpisah yang diambil dalam isolasi, tetapi sebagai pola atau arah yang mengarahkan serangkaian tindakan atau kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu (Stufflebeam & Shinkfield, 2007).

Evaluasi

Evaluasi pada dasarnya dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas suatu kebijakan publik dan memastikan akuntabilitasnya terhadap masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mengkaji tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta mengungkapkan perbedaan antara kondisi ideal yang diharapkan dan realitas yang terjadi. Menurut Muhadjir (1996) evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh

dengan tujuan dan target kebijakan publik yang ditentukan (Meter & Horn, 1975). Dunn (2003) menyatakan bahwa evaluasi merupakan salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan publik karena melalui evaluasi, efektivitas, efisiensi, dan dampak suatu kebijakan dapat diukur secara objektif. Evaluasi berfungsi sebagai alat untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan, dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan selanjutnya, seperti memperbaiki, melanjutkan, atau menghentikan kebijakan tersebut.

Evaluasi Program

Evaluasi program adalah proses sistematis yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan, hasil, dan dampak suatu program guna memastikan bahwa program tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Stufflebeam & Shinkfield (2007) mendefinisikan evaluasi program sebagai pengumpulan, analisis, serta penyajian informasi yang terstruktur untuk menilai kualitas, nilai, dan dampak program, sekaligus memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik. Stufflebeam & Shinkfield (2007) menekankan bahwa evaluasi program menggunakan metode penelitian sosial untuk mengevaluasi pelaksanaan dan hasil program, dengan tujuan meningkatkan efektivitas program, memastikan akuntabilitas, serta memberikan rekomendasi kebijakan.

Kinerja Program

Kinerja program merupakan konsep yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator tertentu seperti efisiensi, efektivitas, relevansi, dan dampak. Moeheriono (2012) mendefinisikan kinerja program sebagai proses sistematis untuk mengukur pencapaian suatu program berdasarkan hasil yang diperoleh, baik berupa keluaran (*output*), hasil (*outcome*), maupun dampaknya terhadap tujuan strategis. Selanjutnya, Moeheriono (2012) menjelaskan bahwa kinerja program mencerminkan sejauh mana visi, misi, dan sasaran organisasi dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang terukur secara sistematis.

Analisis Kebijakan

Dunn (2003) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik. Hal ini menunjukkan bahwa analisis kebijakan tidak hanya sekadar studi akademis, tetapi juga merupakan bagian integral dari dinamika politik yang terjadi saat pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan berfungsi untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai aspek dalam proses pembuatan kebijakan. Ini mencakup analisis terhadap masalah yang ada, identifikasi alternatif solusi, evaluasi dampak dari

kebijakan yang diusulkan, serta pertimbangan terhadap implikasi sosial, ekonomi, dan politik dari kebijakan tersebut.

Program Beasiswa

Lenox (2009) berpendapat bahwa beasiswa adalah hibah yang diberikan untuk meningkatkan atau mengimbangi kesempatan belajar bagi siswa yang berjuang untuk membayar pendidikan karena krisis ekonomi, terutama yang memiliki manfaat akademik. Beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa sebagai bentuk apresiasi prestasi kepada mahasiswa, yang berupa uang dan diberikan kepada perorang mahasiswa.

Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang vital bagi perkembangan manusia, tanpa adanya pendidikan ilmu pengetahuan menjadi sebuah hal yang sia-sia karena tidak terdapat proses pembelajaran sebagaimana yang terdapat didalam proses mendidik. Tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan melalui Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional. Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya bukan bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kelas dua dalam dunia modern atau hanya menjadi pekerja-pekerja dari industri-industri besar yang dibiayai oleh modal asing, tetapi bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berdiri sendiri yang dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya kebudayaan Indonesia yang kaya raya untuk meningkatkan mutu kehidupan maupun masyarakat secara keseluruhan.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian mix methods (metode campuran). Pada penelitian ini, lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari penelitian ini, yaitu Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan mencakup hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang semuanya berkaitan dengan objek penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernyataan Mahasiswa terhadap Distribusi Informasi Program Beasiswa

Tabel 1. Pengetahuan Responden terhadap Dokumen Panduan Program Beasiswa.

Apakah Anda pernah menerima dokumen panduan program beasiswa ini?	Jumlah	Persentase
Ya	57	90,48%
Tidak	6	9,52%

Sumber: Olahan Data Kuesioner, 2025

Berdasarkan tabel 1 di atas mayoritas responden, sebanyak 57 orang (90,48%), menyatakan bahwa mereka telah menerima dokumen panduan program beasiswa. Hanya 6 orang (9,52%) yang mengaku belum menerimanya. Ini menunjukkan bahwa distribusi informasi program telah dilakukan secara luas dan efektif.

Tabel 2. Tingkat Kejelasan Informasi dalam Panduan Program Beasiswa Menurut Responden.

Seberapa jelas isi panduan program menurut Anda?	Jumlah	Persentase
Sangat Jelas	28	44,44%
Cukup Jelas	31	49,21%
Kurang Jelas	3	4,76%
Tidak Jelas	1	1,59%
Total	63	100,00%

Sumber: Olahan Data Kuesioner, 2025

Berdasarkan tabel 2 di atas sebagian besar responden merasa isi panduan program beasiswa cukup jelas (31 orang atau 49,21%) dan sangat jelas (28 orang atau 44,44%). Hanya sedikit yang menilai kurang jelas (3 orang atau 4,76%) dan tidak jelas (1 orang atau 1,59%). Artinya, panduan tersebut umumnya mudah dipahami oleh penerima beasiswa.

Tabel 3. Pemahaman Responden atas Hak dan Kewajiban Penerima Beasiswa.

Apakah Anda memahami hak dan kewajiban sebagai penerima beasiswa?	Jumlah	Persentase
Ya, sangat paham	40	63,49%
Cukup paham	22	34,92%
Tidak Paham	1	1,59%
Total	63	100,00%

Sumber : Olahan Data Kuesioner, 2025

Berdasarkan tabel 3 di atas sebanyak 40 responden (63,49%) merasa sangat paham terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai penerima beasiswa, dan 22 responden (34,92%) merasa cukup paham. Hanya 1 orang (1,59%) yang tidak paham. Ini mengindikasikan tingkat pemahaman yang sangat baik di kalangan penerima beasiswa.

Tabel 4. Pernyataan Responden terhadap Kesesuaian Kriteria Penerima Beasiswa.

Menurut Anda, apakah kriteria penerima beasiswa sudah sesuai?	Jumlah	Persentase
Sangat Sesuai	24	38,10%
Cukup Sesuai	33	52,38%
Tidak Sesuai	6	9,52%
Total	63	100,00%

Sumber : Olahan Data Kuesioner, 2025

Berdasarkan tabel 4 di atas mayoritas responden menilai bahwa kriteria penerima beasiswa sudah sesuai, dengan 33 orang (52,38%) menjawab cukup sesuai dan 24 orang (38,10%) menjawab sangat sesuai. Hanya 6 orang (9,52%) merasa kriteria tersebut tidak sesuai. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa proses seleksi didasarkan pada pertimbangan yang adil.

Tabel 5. Penilaian Responden tentang Proses Seleksi Penerima Beasiswa.

Apakah proses seleksi penerima beasiswa adil dan transparan?	Jumlah	Persentase
Sangat adil	20	31,75%
Cukup adil	38	60,32%
Tidak adil	5	7,94%
Total	63	100,00%

Sumber : Olahan Data Kuesioner, 2025

Berdasarkan tabel 5 di atas sebanyak 38 orang (60,32%) menyatakan bahwa proses seleksi cukup adil, dan 20 orang (31,75%) menilai sangat adil. Hanya 5 responden (7,94%) yang menilai proses seleksi tidak adil. Dengan demikian, proses seleksi beasiswa dipandang cukup transparan dan dapat dipercaya.

Tabel 6. Kesesuaian Nominal Beasiswa dengan Kebutuhan Kuliah Responden.

Apakah nominal beasiswa mencukupi kebutuhan kuliah Anda?	Jumlah	Persentase
Ya, sangat mencukupi	14	22,22%
Cukup mencukupi	38	60,32%
Tidak mencukupi	11	17,46%
Total	63	100,00%

Sumber : Olahan Data Kuesioner, 2025

Berdasarkan tabel 6 di atas sebanyak 38 responden (60,32%) merasa nominal beasiswa cukup mencukupi kebutuhan kuliah, dan 14 orang (22,22%) menilai sangat mencukupi. Namun, terdapat 11 orang (17,46%) yang merasa beasiswa tidak mencukupi. Secara umum, beasiswa dianggap cukup membantu secara ekonomi.

Tabel 7. Tingkat Manfaat Beasiswa dalam Meringankan Beban Finansial Responden.

Seberapa besar beasiswa ini membantu Anda secara finansial?	Jumlah	Persentase
Sangat membantu	37	58,73%
Cukup membantu	22	34,92%
Kurang membantu	4	6,35%
Total	63	100,00%

Sumber : Olahan Data Kuesioner, 2025

Berdasarkan tabel 7 di atas mayoritas responden merasakan dampak positif dari beasiswa terhadap kondisi finansial mereka, dengan 37 orang (58,73%) menyatakan sangat terbantu dan 22 orang (34,92%) merasa cukup terbantu. Hanya 4 orang (6,35%) yang merasa kurang terbantu.

Tabel 8. Ketergantungan Responden terhadap Beasiswa untuk Melanjutkan Pendidikan.

Jika tidak menerima beasiswa,apakah Anda tetap bisa melanjutkan kuliah?	Jumlah	Persentase
Ya	13	20,63%
Tidak	27	42,86%
Tidak yakin	23	36,51%
Total	63	100,00%

Sumber : Olahan Data Kuesioner,2025

Berdasarkan tabel 8 di atas sebanyak 27 responden (42,86%) menyatakan tidak bisa melanjutkan kuliah jika tidak menerima beasiswa, sementara 23 orang (36,51%) merasa tidak yakin. Hanya 13 orang (20,63%) yang merasa tetap mampu melanjutkan kuliah. Hal ini menandakan pentingnya beasiswa dalam keberlangsungan pendidikan mereka.

Tabel 9. Persepsi Responden tentang Pengaruh Beasiswa terhadap Fokus Kuliah.

Dengan adanya beasiswa ini,apakah Anda bisa lebih fokus pada kuliah?	Jumlah	Persentase
Ya	62	98,41%
Tidak	1	1,59%
Total	63	100,00%

Sumber : Olahan Data Kuesioner, 2025

Berdasarkan tabel 9 di atas sebagian besar responden (98,41% atau 62 orang) menyatakan bahwa beasiswa membantu mereka untuk lebih fokus pada kuliah, sedangkan hanya 1 orang (1,59%) yang merasa sebaliknya. Ini menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap konsentrasi akademik.

Tabel 10. Dampak Beasiswa terhadap Peningkatan Prestasi Akademik Responden.

Apakah IPK Anda mengalami peningkatan setelah menerima beasiswa?	Jumlah	Persentase
Ya	48	76,19%
Tidak	15	23,81%
Total	63	100,00%

Sumber : Olahan Data Kuesioner, 2025

Berdasarkan tabel 10 di atas Sebanyak 48 orang (76,19%) mengaku mengalami peningkatan IPK setelah menerima beasiswa, sedangkan 15 orang (23,81%) tidak mengalami perubahan. Ini menunjukkan bahwa beasiswa berpengaruh positif terhadap prestasi akademik.

Tabel 11. Dampak Beasiswa terhadap Motivasi Belajar Responden.

Apakah Anda aktif dalam kegiatan k/non-akademik kampus sejak menerima beasiswa?	Jumlah	Persentase
Ya, sangat termotivasi	46	73,02%
Cukup termotivasi	17	26,98%
Total	63	100,00%

Sumber : Olahan Data Kuesioner, 2025

Berdasarkan tabel 11 di atas mayoritas responden menyatakan lebih termotivasi dalam belajar setelah menerima beasiswa, dengan 46 orang (73,02%) menyatakan sangat termotivasi dan 17 orang (26,98%) merasa cukup termotivasi. Tidak ada responden yang menyatakan tidak termotivasi.

Tabel 12. Dampak Program Beasiswa terhadap Partisipasi Akademik dan Non-Akademik Mahasiswa.

Apakah Anda aktif dalam kegiatan akademik/non-akademik kampus sejak menerima beasiswa?	Jumlah	Persentase
Ya	37	58,73%
Tidak	26	41,27%
Total	63	100,00%

Sumber : Olahan Data Kuesioner, 2025

Berdasarkan tabel 12 di atas Sebanyak 37 responden (58,73%) menjadi lebih aktif dalam kegiatan akademik maupun non-akademik kampus sejak menerima beasiswa, sedangkan 26 orang (41,27%) tidak aktif. Ini menunjukkan bahwa beasiswa turut mendorong partisipasi mahasiswa di lingkungan kampus.

Tabel 13. Persepsi Responden terhadap Kualitas dan Pelaksanaan Program Beasiswa.

Secara umum, bagaimana anda menilai progra beasiswa ini?	Jumlah	Persentase
Sangat baik	29	46,03%
Baik	25	39,68%
Cukup	9	14,29%
Total	63	100,00%

Sumber : Olahan Data Kuesioner,2025

Berdasarkan tabel 13 di atas sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap program beasiswa, dengan 29 orang (46,03%) menilai program ini sangat baik, 25 orang (39,68%) menilai baik, dan hanya 9 orang (14,29%) yang menilai cukup. Tidak ada penilaian negatif yang diberikan, menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap program.

Analisis Evaluasi Program Pemberian Beasiswa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Dampaknya Terhadap Mahasiswa Penerima Beasiswa

Berdasarkan data demografi responden diatas, mayoritas penerima beasiswa adalah perempuan, yakni sebanyak 39 orang (61,90%), sementara laki- laki berjumlah 24 orang (38,10%). Dari segi usia, responden didominasi oleh mahasiswa berusia 19 tahun sebanyak 32 orang (50,79%), disusul oleh usia 18 tahun dengan 13 orang (20,63%), serta kelompok usia lainnya yang tersebar merata antara 20 hingga 23 tahun. Sebagian besar responden (90,48%) menyatakan pernah menerima dokumen panduan program beasiswa, menunjukkan bahwa informasi mengenai program ini telah disosialisasikan dengan baik. Terkait kejelasan isi panduan, mayoritas responden menilai panduan tersebut cukup jelas (49,21%) dan sangat jelas (44,44%), sedangkan hanya sebagian kecil yang merasa kurang jelas atau tidak jelas. Hal ini sejalan dengan tingkat pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai penerima beasiswa, di mana 63,49% mengaku sangat paham dan 34,92% cukup paham.

Dalam menilai kesesuaian kriteria penerima beasiswa, 52,38% responden menilai kriteria tersebut cukup sesuai dan 38,10% menganggap sangat sesuai, dengan hanya 9,52% yang merasa tidak sesuai. Penilaian terhadap proses seleksi juga menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, di mana 60,32% menyebut proses seleksi cukup adil dan 31,75% menyebut sangat adil. Mengenai nominal beasiswa, 60,32% merasa jumlahnya cukup mencukupi kebutuhan kuliah dan 22,22% menyatakan sangat mencukupi.

Beasiswa ini juga dinilai sangat membantu secara finansial oleh 58,73% responden, sedangkan 34,92% merasa cukup terbantu. Jika tidak menerima beasiswa, sebanyak 42,86% menyatakan tidak dapat melanjutkan kuliah dan 36,51% merasa tidak yakin, menunjukkan bahwa beasiswa sangat berperan penting dalam keberlanjutan pendidikan

mereka. Sebanyak 98,41% responden menyatakan bahwa beasiswa membuat mereka bisa lebih fokus pada kuliah.

Lebih lanjut, 76,19% responden melaporkan peningkatan IPK setelah menerima beasiswa, dan 73,02% merasa lebih termotivasi dalam belajar. Selain itu, 58,73% menyatakan menjadi lebih aktif dalam kegiatan akademik maupun non- akademik kampus. Secara keseluruhan, program beasiswa ini dinilai sangat baik oleh 46,03% responden dan baik oleh 39,68%, yang mencerminkan apresiasi tinggi terhadap keberadaan program tersebut.

Relevansi (Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Masyarakat)

Program pemberian beasiswa hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan mitra melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang berasal dari daerah tersebut. Program ini dirancang sebagai upaya pemberdayaan generasi muda melalui sektor pendidikan, dengan harapan dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkontribusi bagi pembangunan daerah. Menurut Bapak Jefry Tambunan, S.Sos., selaku Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat tujuan utama dari program beasiswa ini adalah untuk mendukung mahasiswa berprestasi namun kurang mampu secara ekonomi agar dapat menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa hambatan biaya. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan serta pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dan capaian akademik mahasiswa.

Program ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam mendukung peningkatan akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian beasiswa berbasis kerja sama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemkab dengan berbagai perguruan tinggi. Pendekatan yang diterapkan dalam program ini tidak hanya berorientasi pada bantuan finansial semata, tetapi juga mencerminkan upaya strategis untuk membangun sumber daya manusia unggul yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Jefry Tambunan S.Sos., selaku Plt. Kabag Kesra Labura secara aktif menjalin kerja sama kelembagaan dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta, serta memfasilitasi mahasiswa melalui pembiayaan kuliah, pembinaan, dan pendampingan selama masa studi.

Meskipun program beasiswa telah berjalan dan memberikan manfaat bagi mahasiswa, namun masih terdapat pertanyaan mengenai kejelasan acuan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya, belum semua pihak mengetahui secara pasti apakah terdapat panduan resmi atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan rujukan dalam penyaluran maupun pengelolaan program beasiswa ini. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan dalam wawancara berikut, yang menyoroti perlunya dokumen atau petunjuk teknis yang jelas agar pelaksana program dapat berjalan secara transparan, konsisten, dan tepat sasaran.

Program beasiswa ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan finansial, tetapi juga diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk bertanggung jawab dalam menjalani studi mereka. Namun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi tantangan, salah satunya adalah belum optimalnya mekanisme pengawasan terhadap mahasiswa penerima beasiswa selama masa perkuliahan. Wawancara dengan informan menegaskan bahwa pengawasan akademik serta evaluasi berkala terhadap mahasiswa penerima beasiswa sangat diperlukan, agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan mendorong peningkatan prestasi. Sebagaimana disampaikan oleh Kak Tika Siregar, Staf Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Utara, saat ini sebagian besar pengawasan masih bersifat administratif, seperti pelaporan IPK setiap semester.

Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Labuhanbatu Utara, Jefry Tambunan, S.Sos, menekankan pentingnya adanya prosedur yang jelas dan terstruktur dalam menangani mahasiswa penerima beasiswa yang melanggar ketentuan atau tidak memenuhi komitmen akademik selama masa studi. Hal ini dinilai penting untuk memastikan bahwa program beasiswa tetap berjalan secara profesional dan hanya diberikan kepada mahasiswa yang serius serta bertanggung jawab.

Selain aspek pemberian bantuan, evaluasi terhadap program beasiswa juga perlu mencakup sejauh mana Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan monitoring dan pengawasan secara rutin terhadap perguruan tinggi mitra maupun mahasiswa penerima beasiswa. Monitoring ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan, serta untuk mendeteksi sejak dini potensi permasalahan dalam proses akademik mahasiswa.

Namun, berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat mekanisme monitoring rutin yang dilakukan oleh Pemkab Labuhanbatu Utara, baik dalam bentuk kunjungan ke perguruan tinggi mitra maupun evaluasi langsung terhadap

perkembangan mahasiswa penerima beasiswa. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Jefry Tambunan, S.Sos., sebagaimana berikut:

Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program beasiswa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara tidak hanya diukur dari jumlah mahasiswa yang menerima bantuan, tetapi juga dari kontribusi nyata para alumni penerima beasiswa terhadap pembangunan daerah setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Program ini diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki komitmen untuk kembali dan berkontribusi bagi kemajuan daerah asalnya.

Menurut keterangan dari pihak yang diwawancarai, terdapat upaya untuk mendorong keterlibatan para alumni dalam pembangunan lokal, baik melalui pengabdian di sektor pemerintahan, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, belum semua alumni memiliki kesempatan atau saluran yang terstruktur untuk berkontribusi secara langsung, sehingga perlu strategi keberlanjutan yang mendorong keterlibatan mereka secara aktif.

Dalam pelaksanaan program beasiswa, tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh pihak penyelenggara. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam evaluasi ini adalah kendala utama yang muncul selama pengelolaan program beasiswa. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan teknis penyaluran, tetapi juga menyangkut harapan masyarakat terhadap cakupan bantuan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masyarakat penerima beasiswa berharap agar bantuan yang diberikan tidak hanya terbatas pada biaya kuliah, tetapi juga dapat mencakup kebutuhan pendukung lainnya, seperti biaya hidup, transportasi, atau kebutuhan akademik tambahan. Namun, harapan tersebut belum dapat dipenuhi secara menyeluruh karena adanya keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang juga harus dialokasikan untuk berbagai program pembangunan lainnya.

Salah satu aspek penting dalam evaluasi program adalah melihat sejauh mana pemerintah daerah merencanakan perbaikan atau pengembangan program beasiswa ke depan. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan program serta menjawab dinamika kebutuhan mahasiswa dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menyampaikan bahwa pengembangan program ke depan sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, keberlanjutan dan perluasan program beasiswa akan terus diupayakan selama kondisi fiskal daerah memungkinkan. Komitmen untuk mempertahankan program ini tetap ada, namun perlu disesuaikan dengan prioritas anggaran dan ketersediaan dana yang dimiliki pemerintah daerah.

Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Utara, Jefry Tambunan, S.Sos., menekankan pentingnya keberlanjutan dan pengembangan program beasiswa di masa yang akan datang. Menurut beliau program ini sebaiknya tidak hanya berhenti pada aspek pemberian bantuan biaya kuliah semata, tetapi juga terus diperluas agar lebih banyak mahasiswa yang berpotensi namun kurang mampu secara ekonomi dapat merasakan manfaatnya.

Selain itu, diharapkan juga adanya peningkatan kualitas program melalui evaluasi berkala, perluasan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, serta penguatan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap mahasiswa penerima. Dengan langkah-langkah tersebut, program beasiswa diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam membangun sumber daya manusia unggul dan mendorong percepatan pembangunan daerah.

Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai keberlanjutan program, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan pengembangan kebijakan yang lebih inklusif. Salah satu tantangan yang harus diatasi adalah ketimpangan persepsi dan distribusi manfaat di kalangan mahasiswa, khususnya antara mahasiswa yang menerima beasiswa dan mereka yang belum tersentuh program.

Pada praktiknya, program ini belum menjangkau seluruh mahasiswa yang membutuhkan, dan sebagian mahasiswa merasa bahwa proses seleksi maupun cakupan bantuan belum sepenuhnya adil atau merata. Hal ini dapat menimbulkan potensi kecemburuan sosial atau ketegangan antarmahasiswa, terlebih ketika terdapat perbedaan yang signifikan dalam dukungan yang diterima, padahal mereka sama-sama menghadapi tantangan biaya pendidikan dan kesenjangan akses.

Dengan demikian, ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat program beasiswa ini berisiko memperlemah semangat kebersamaan serta menimbulkan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa, sehingga perlu adanya perbaikan mekanisme dan pengawasan untuk memastikan program ini benar-benar berdampak secara adil dan menyeluruh. Selain harapan agar program

beasiswa dapat terus berlanjut dan ditingkatkan cakupannya, terdapat pula harapan terhadap kontribusi para alumni penerima beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dan saat ini bekerja di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dalam wawancara, disampaikan bahwa alumni diharapkan dapat menjadi penghubung atau fasilitator informasi, khususnya jika terdapat dukungan materiil dari lembaga atau pihak non- pemerintah yang dapat disalurkan untuk membantu mahasiswa penerima beasiswa MoU, di luar dari pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah ditanggung pemerintah daerah.

Dengan adanya dukungan tambahan tersebut, diharapkan mahasiswa penerima beasiswa dapat lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan operasional selama menjalani studi, seperti biaya hidup, transportasi, maupun kebutuhan akademik lainnya. Hal ini juga menjadi bentuk kontribusi nyata dari para alumni dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas program beasiswa, sekaligus memperkuat solidaritas antar sesama penerima manfaat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi program pemberian beasiswa kerja sama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan perguruan tinggi, dapat disimpulkan bahwa program ini merupakan kebijakan strategis yang lahir untuk menjawab rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi, khususnya bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, dengan dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 41 Tahun 2021. Dari aspek input, program ini dilaksanakan melalui kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi ternama, meskipun nominal beasiswa dinilai belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan biaya pendidikan dan hidup mahasiswa. Dari sisi proses, pelaksanaan program telah mencakup tahapan sosialisasi, seleksi, dan penyaluran dana, namun masih terdapat kendala berupa sosialisasi yang belum merata, transparansi seleksi yang perlu ditingkatkan, serta monitoring yang masih bersifat administratif. Dari aspek produk, program ini terbukti mampu meningkatkan akses pendidikan tinggi dan mendorong keadilan pendidikan di daerah. Selain itu, program juga memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan mahasiswa penerima, ditunjukkan melalui peningkatan motivasi belajar, prestasi akademik, serta partisipasi dalam kegiatan kampus. Secara keseluruhan, berdasarkan model evaluasi CIPP, program beasiswa kerja sama ini telah memberikan kontribusi positif, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam aspek sosialisasi, transparansi, penyesuaian nominal bantuan, serta evaluasi yang lebih komprehensif terhadap perkembangan mahasiswa.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi program beasiswa kerja sama (MoU) melalui berbagai media komunikasi serta menjangkau langsung sekolah-sekolah agar informasi dapat diterima secara merata oleh calon penerima yang berpotensi. Selain itu, pemerintah perlu menyesuaikan nominal beasiswa agar lebih relevan dengan kebutuhan biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa, serta memperluas kerja sama dengan lebih banyak perguruan tinggi mitra baik di dalam maupun di luar daerah. Proses seleksi juga perlu disempurnakan agar lebih transparan, objektif, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Di samping itu, mekanisme monitoring dan evaluasi perlu ditingkatkan agar tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup perkembangan akademik dan motivasi mahasiswa. Pemerintah dan pihak perguruan tinggi juga diharapkan dapat menambahkan program pendampingan seperti pelatihan soft skills, pengembangan kepemimpinan, serta pembentukan forum alumni guna memperkuat dampak program. Dengan berbagai perbaikan tersebut, program beasiswa kerja sama diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

DAFTAR REFERENSI

- Defa, S. S. P., Stiawati, T., & Rahayu, S. (2024). Implementasi Program Beasiswa Full Sarjana Di Kota Cilegon. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(5), 1–10.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Fiani, V. E. A., AP, M. A., & Ng, A. (2024). Dampak Program Beasiswa “Bakti BCA” Terhadap Mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 5(1), 48–55.
- Franzen, A. (2020). Scholarship Programs As A Model For Youth Leadership Development. *Journal Of Higher Education Policy*, 22(1), 45–60.
- Gufron, A., Simanjuntak, R. A., & Novianti, A. (2022). Efektivitas Program Beasiswa dalam Meningkatkan Kualitas SDM. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 11(1), 25–38.
- Hilal, S., Scott, G., & Maadad, N. (2015). The Impact Of Government Scholarships On Academic Performance. *International Review Of Education*, 61(2), 123–141.
- Ilechukwu, S. (2014). Scholarships As A Tool For Human Capital Development. *African Journal Of Education And Development*, 5(1), 55–72.
- Kunaryo, S. (2009). *Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lenox, D. (2009). *Scholarship And Financial Aid Guide For Students*. Oxford Press.

- Meter, D. V., & Horn, C. V. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration \& Society*, 6(4), 445–488.
- Moeheriono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. RajaGrafindo Persada.
- Neely, A., Gregory, M., & Platts, K. (2002). Performance Measurement System Design. *International Journal of Operations \& Production Management*, 20(10), 1229–1253.
- Sari, M. (2023). Evaluasi Program Beasiswa Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tinggi*, 5(2), 110–130.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation Theory, Models, and Applications*. Jossey-Bass.
- Thahirah, M. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Pemerintah Kota Dumai Kepada Mahasiswa Dan Mahasiswi Berprestasi Dari Keluarga Kurang Mampu Asal Kota Dumai*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.